JOURNAL OF HUMAN AND EDUCATION

E-ISSN: 2776-5857 | P-ISSN: 2776-7876
Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe
Vol. 6, No. 6 (2026)

Pelatihan Penyusunan Policy Brief Bagi Organisasi Pemuda Gereja Di Kabupaten Jayapura

Claudia Conchita Renyoet[1], Melpayanty Sinaga[2*], [3]Terianus Luther Safkaur
[1,2]Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia
[3] Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, Universitas Cenderawasih, Jayapura,
**Email korespondensi: melpayanty@gmail.com*

ABSTRAK
Organisasi masyarakat sipil di Papua, termasuk organisasi pemuda Gereja, memiliki modal sosial yang kuat namun umumnya belum memiliki kapasitas teknis untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam dokumen kebijakan yang dapat diadopsi birokrasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membangun kapasitas analitis dan teknis organisasi Pemuda Gereja GPI Jalan Suci Cabang Kabupaten Jayapura agar mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi rekomendasi kebijakan berbasis bukti, dengan penyusunan policy brief sebagai medianya. Sebanyak 21 pengurus dan anggota mengikuti pelatihan satu hari secara penuh. Kegiatan menerapkan pendekatan pemberdayaan partisipatif dan prinsip pembelajaran orang dewasa yang dilaksanakan melalui tahap penjajakan kebutuhan, lokakarya intensif, dan simulasi advokasi. Ketercapaian diukur menggunakan metode campuran yang memadukan skor pra-tes dan pasca-tes dengan penilaian kualitas dokumen yang dihasilkan. Hasil menunjukkan pemahaman peserta meningkat rata-rata 40,4 persen, dari 42,3 menjadi 82,7, melampaui target awal 40 persen. Tiga draf policy brief orisinal berhasil disusun dengan tema akses pendidikan dasar, layanan administrasi publik digital, dan mitigasi narkotika di kalangan pemuda. Sebuah forum keberlanjutan turut dibentuk. Program ini memperkuat pergeseran peserta dari objek kebijakan menjadi aktor yang berdaya dalam advokasi kebijakan
Kata Kunci: pemuda Gereja; policy brief; advokasi kebijakan; partisipasi publik; Otonomi Khusus Papua

PENDAHULUAN

Kabupaten Jayapura sedang mengalami fase transisi struktural yang kompleks dan percepatan pembangunan, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Otsus) Jilid II serta kebijakan pembentukan daerah otonom baru. Transformasi ini mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Menanggapi seruan akan tata kelola yang lebih partisipatif, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun anggaran 2025 di Kabupaten Jayapura menghasilkan 313 program dengan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun (InfoPublik, 2024). Sumber daya keuangan yang begitu besar tersebut memerlukan pemantauan kritis dari organisasi masyarakat sipil guna memastikan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang inklusif.

Di tengah lanskap pembangunan yang dinamis ini, organisasi pemuda — terutama kelompok pemuda Gereja — memainkan peran fungsional yang sangat penting. Kaum muda dipandang sebagai penjaga moral dan pilar masa depan, dengan keterikatan organisasional pada realitas akar rumput. Namun, keterlibatan Gereja dalam menyelesaikan isu-isu publik di Papua dianggap belum memadai (Kompas.com, 2024), dan marginalisasi serta ketimpangan pembangunan di Papua Barat merupakan tantangan struktural yang telah berlangsung lama (Feneteruma, 2023). Gereja Pekabaran Injil (GPI) Jalan Suci Cabang Jayapura merupakan salah satu pusat utama bagi perkembangan moral dan spiritual kaum muda di Papua Barat. Gereja ini memiliki landasan sejarah yang kuat serta model kepemimpinan kolektif yang didasarkan pada pelayanan masyarakat.

Sebuah analisis terhadap situasi sebelum pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang mengkhawatirkan antara tingkat komitmen organisasi yang tinggi dengan tingkat literasi dan keterlibatan pemuda yang rendah dalam advokasi kebijakan. Kaum pemuda cenderung terlibat dalam upacara keagamaan dan inisiatif amal. Ketika dihadapkan pada forum-forum strategis yang menuntut partisipasi publik, seperti proses Musrenbang untuk mengumpulkan aspirasi, gagasan yang disampaikan seringkali tidak lebih dari keluhan emosional, protes reaktif, atau seruan moral yang sulit diadopsi oleh birokrasi perencanaan.

Ringkasan kebijakan merupakan salah satu alat advokasi paling efektif untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat sipil dan pemerintah. Dokumen analitis ini dirancang untuk menyajikan evaluasi empiris terhadap isu-isu publik serta menawarkan solusi praktis kepada pembuat kebijakan (LAN RI, 2023). Kualitas ringkasan kebijakan ditentukan oleh kejelasan analisis dan rekomendasinya (Suryawati et al., 2023; Wigati & Ciptanurani, 2023). Bagi organisasi masyarakat sipil, kemampuan menulis ringkasan kebijakan sangat penting untuk menerjemahkan aspirasi ke dalam bahasa yang dipahami oleh para teknokrat dan sistem birokrasi (PWYP Indonesia, 2022; SKALA, 2025). Namun, sebagian besar organisasi masyarakat sipil di daerah pedesaan, termasuk Pemuda GPI Jalan Suci, tidak memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan untuk menyusun dokumen semacam itu. Mereka tidak terbiasa dengan metodologi seperti menganalisis akar masalah, memetakan pemangku kepentingan, dan merumuskan rekomendasi hukum yang selaras dengan arah kebijakan negara.

Sejumlah pihak telah menyelenggarakan pelatihan serupa, seperti lembaga *think tank* dan kementerian yang rutin membekali analis dengan keterampilan penyusunan policy brief (Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2020; The PRAKARSA, 2024). Berbagai program pemberdayaan berbasis pelatihan juga terbukti mampu menumbuhkan kemandirian dan kapasitas kelompok sasaran di tingkat komunitas (Prasandha & Susanti, 2022; Zulys et al., 2023). Namun, pelatihan semacam itu umumnya berfokus pada keterampilan menulis bagi individu atau analis, dan masih jarang menjangkau organisasi kepemudaan berbasis agama di kawasan timur Indonesia. Padahal, dalam konteks Otsus Papua Jilid II, partisipasi masyarakat sipil yang bermakna sangat dibutuhkan untuk mengawal kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan. Kesenjangan inilah yang menjadi pijakan rasional kegiatan pengabdian ini. Kontribusi kegiatan ini tidak sekadar memberikan pelatihan menulis policy brief, melainkan membangun kapasitas organisasi pemuda gereja untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang siap dibawa ke forum perencanaan, seperti forum Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan analisis situasi, tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk: (1) meningkatkan pemahaman peserta mengenai siklus kebijakan dan pentingnya partisipasi pemuda pasca-Otsus;(2) membekali peserta dengan keterampilan menganalisis isu-isu publik menggunakan analisis pohon masalah dan diagram tulang ikan; (3) mengembangkan keterampilan pemetaan pemangku kepentingan peserta menggunakan matriks kepentingan-kekuasaan; (4) mentransfer keterampilan teknis dalam menyusun dokumen ringkasan kebijakan; (5) menghasilkan ringkasan kebijakan orisinal yang berfokus pada isu-isu strategis lokal di Kabupaten Jayapura. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga kapasitas lembaga mitra sebagai aktor dalam advokasi kebijakan.

METODE

Kegiatan ini ditujukan bagi pengurus dan anggota Organisasi Pemuda GPI cabang Jalan Suci di Kabupaten Jayapura. Diselenggarakan di Aula Gereja GPI Suci di Kabupaten Jayapura, Kegiatan ini berupa pelatihan satu hari pada hari Sabtu, 5 September 2026, pukul 09.00 hingga 16.00 WIT. Kegiatan ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan pendampingan yang berlangsung selama periode acara tersebut. Sebanyak 21 peserta mengikuti pelatihan tersebut secara penuh.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan pemberdayaan partisipatif yang menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa (andragogi) dengan metode belajar sambil melakukan. Pendekatan praktis dan langsung ini sejalan dengan temuan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya, yang mengutamakan keterlibatan aktif peserta sebagai kunci keberhasilan (Purnasasmita et al., 2024; Zulys et al., 2023). Pelaksanaannya dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama melibatkan pelaksanaan penilaian kebutuhan bersama manajer cabang dan koordinator komisi pemuda untuk memvalidasi pemahaman awal peserta dan mengidentifikasi tiga bidang prioritas. Tahap kedua terdiri dari lokakarya yang mencakup presentasi dan kegiatan kelompok intensif. Tahap ketiga mencakup simulasi advokasi dan evaluasi, termasuk menyiapkan dan menyerahkan dokumen kepada mitra.

Materi kegiatan meliputi delapan pokok bahasan, yaitu: definisi dan karakteristik *policy brief*; urgensi penyusunan *policy brief*; metode analisis isu publik; sistematika penulisan; prinsip penulisan SAMAN (Singkat, Akurat, Meyakinkan, Aktual, dan Netral); pemanfaatan data berbasis bukti; strategi advokasi kebijakan; serta pembedahan contoh policy brief. Bahan analisis isu bersumber dari statistik pemerintah, hasil riset akademik, dan dokumen kebijakan resmi yang relevan dengan konteks Kabupaten Jayapura.

Pencapaian kegiatan dievaluasi menggunakan pendekatan campuran (mixed-methods). Dimensi kuantitatif diukur dengan membandingkan skor pra-tes dan pasca-tes menggunakan instrumen berisi 30 pertanyaan yang mencakup empat domain: konsep kebijakan publik; metode analisis isu; pemetaan pemangku kepentingan; dan struktur ringkasan kebijakan. Peningkatan pemahaman dihitung menggunakan skor kenaikan rata-rata, yang diuji signifikansinya secara statistik. Dimensi kualitatif dievaluasi melalui kualitas ringkasan kebijakan yang dihasilkan, dinamika partisipasi selama lokakarya, dan keberlanjutan lembaga setelah kegiatan. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman peserta setidaknya sebesar 40 persen, serta produksi setidaknya tiga ringkasan kebijakan orisinal yang layak untuk dipresentasikan di forum kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Peserta dan Pelaksanaan Kegiatan

Sebanyak 21 peserta mengikuti kegiatan tersebut, dan semuanya hadir sepanjang hari. Dari segi komposisi, para peserta mewakili struktur keanggotaan organisasi. Dari segi jenis kelamin, peserta terdiri dari 12 laki-laki (57,1 persen) dan sembilan perempuan (42,9 persen), sehingga memastikan keterwakilan kedua jenis kelamin yang relatif seimbang. Dari segi usia, sebagian besar peserta berada dalam kelompok usia 20–29 tahun (16 orang), diikuti oleh kelompok usia 17–19 tahun (tiga orang) dan kelompok usia 30–35 tahun (dua orang). Latar belakang pendidikan peserta bervariasi, mulai dari lulusan sekolah menengah atas dan siswa aktif hingga lulusan perguruan tinggi, dengan mayoritas merupakan mahasiswa dan profesional muda. Keragaman profil ini merupakan aset sosial yang penting untuk menyebarluaskan keterampilan advokasi di seluruh organisasi. Komposisi lengkap peserta disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Peserta Pelatihan Berdasarkan Karakteristik Demografi

Karakteristik	Kategori	Jumlah (Persen)
Jenis Kelamin	Laki-laki	12 (57,1%)
	Perempuan	9 (42,9%)
Rentang Usia	17–19 tahun	3 (14,3%)
	20–29 tahun	16 (76,2%)
	30–35 tahun	2 (9,5%)

Sumber: Data primer diolah, 2026

Sebelum sesi dimulai, para peserta mengisi tes awal. Bagian utama sesi ini terdiri dari presentasi intensif dan berkelanjutan serta latihan-latihan praktis. Gambar 1 menggambarkan bagaimana materi tersebut disampaikan kepada para peserta.



Gambar 1. Pemaparan Materi Policy Brief kepada Peserta Pemuda GPI Jalan Suci

2. Peningkatan Pemahaman Peserta

Hasil tes awal dan tes akhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta. Rata-rata, skor peserta naik dari 42,3 pada tes awal menjadi 82,7 pada tes akhir, yang menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 40,4%, yang secara statistik signifikan ($p < 0,001$). Pencapaian ini melampaui target awal sebesar 40%. Tabel 2 menyajikan skor rata-rata per domain kompetensi.

Tabel 2. Perbandingan Rata-rata Skor Pra-tes dan Pasca-tes Peserta

Domain Kompetensi	Pra-tes	Pasca-tes	Selisih
Konsep kebijakan publik	45,1	84,3	39,2
Metode analisis isu	40,8	81,5	40,7
Pemetaan pemangku kepentingan	39,6	80,2	40,6
Struktur policy brief	43,7	84,8	41,1
Rata-rata keseluruhan	**42,3**	**82,7**	**40,4**

Sumber: Data primer diolah, 2026

Peningkatan yang merata di keempat domain tersebut menunjukkan bahwa transfer pengetahuan bersifat komprehensif dan tidak hanya terfokus pada satu aspek saja. Sejalan dengan fokus utama lokakarya pada praktik penyusunan dokumen, domain struktur ringkasan kebijakan mencatat selisih tertinggi. Temuan ini menegaskan keefektifan pendekatan "belajar sambil melakukan" dalam mengembangkan keterampilan teknis yang sebelumnya tidak tersedia melalui saluran pelatihan internal Gereja (LAN RI, 2023). Peningkatan pada domain analisis isu juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan, sebagaimana ditekankan dalam studi metodologis kebijakan publik (Johannes et al., 2023).

3. Dinamika Partisipasi

Sepanjang pelatihan, tim layanan mencatat kemajuan pembelajaran para peserta. Pada sesi-sesi awal, para peserta cenderung bersikap pasif, hanya berperan sebagai penerima informasi — hal yang umum terjadi di kalangan mereka yang baru mengenal terminologi kebijakan publik. Namun, seiring berjalannya sesi tentang metode dan penulisan sistematis, interaksi meningkat secara signifikan dan para peserta mulai mendiskusikan akar permasalahan, lalu secara kolaboratif menerjemahkannya ke dalam kerangka kerja analitis. Puncak keterlibatan terjadi selama sesi tentang penggunaan data berbasis bukti dan strategi advokasi, ketika para peserta secara mandiri memetakan para pelaku kebijakan dan merumuskan rekomendasi. Pergeseran dari partisipasi pasif ke aktif ini merupakan indikator kualitatif penting dari keberhasilan metode ini. Gambar 2 mengilustrasikan tingkat keterlibatan para peserta saat mereka berbagi ide dan mengajukan pertanyaan selama sesi diskusi dan tanya jawab. Gambar 3 menunjukkan para peserta dan tim layanan masyarakat di akhir kegiatan.



Gambar 2. Partisipasi Aktif Peserta dalam Sesi Diskusi dan Tanya Jawab



Gambar 3. Foto Bersama Peserta dan Tim Pengabdi FISIP UNCEN

4. Keberlanjutan dan Refleksi Capaian

Sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan, inkubator 'Lingkar Studi Kebijakan Pemuda GPI' didirikan sebagai forum komunikasi digital yang terdiri dari alumni, peserta, dan moderator dari tim pelaksana. Dalam beberapa minggu setelah acara, forum tersebut dimanfaatkan untuk membahas rencana pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura, serta untuk bertukar referensi kebijakan. Ketiga draf ringkasan kebijakan tersebut telah melalui proses penyuntingan tata letak secara profesional dan diserahkan kepada pimpinan cabang GPI Jalan Suci untuk digunakan sebagai bahan diskusi Musrenbang tahun depan.

Pelaksanaan kegiatan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor pendukung meliputi tingginya antusiasme peserta, dukungan penuh dari pimpinan cabang, kesesuaian dengan kebutuhan nyata organisasi, serta pendekatan pembelajaran yang praktis. Faktor-faktor penghambat meliputi alokasi waktu yang terbatas pada hari tersebut, yang mengakibatkan beberapa materi teknis tidak dapat dibahas secara mendalam, tingkat pemahaman awal peserta yang bervariasi, serta keterbatasan akses terhadap data sekunder terkini di tingkat kabupaten. Berdasarkan refleksi ini, tim layanan menyadari bahwa keberhasilan pada tahap penyusunan dokumen tidak menjamin keberhasilan pada tahap advokasi. Agar ringkasan kebijakan diterima dan ditindaklanjuti oleh para pembuat keputusan, diperlukan proses politik yang membutuhkan dukungan berkelanjutan, jaringan, dan ketekunan. Oleh karena itu, pencapaian ini harus dipandang sebagai langkah pertama dalam proses pemberdayaan advokasi kebijakan pemuda di Gereja, bukan langkah terakhir.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan kemampuan analitis dan kompetensi teknis organisasi pemuda Pemuda GPI Jalan Suci di Kabupaten Jayapura dalam menyusun ringkasan

kebijakan. Pemahaman peserta meningkat rata-rata sebesar 40,4 persen (dari 42,3 menjadi 82,7), yang tidak hanya signifikan secara statistik ($p < 0,001$) tetapi juga melampaui target awal sebesar 40 persen. Program ini juga menghasilkan tiga ringkasan kebijakan orisinal mengenai pendidikan dasar, layanan administrasi publik digital, dan mitigasi narkoba, yang telah diserahkan kepada mitra untuk keperluan advokasi. Keberlanjutan program ini dijamin melalui pembentukan forum 'Lingkar Studi Kebijakan Pemuda GPI'. Kekuatan program ini terletak pada pendekatan praktisnya dan relevansi tema-tema yang diangkat dengan kebutuhan mitra, sedangkan keterbatasannya terletak pada durasi pelatihan yang singkat dan kurangnya tindak lanjut advokasi.

Disarankan agar kegiatan lanjutan difokuskan pada tahap pasca-penyusunan, dengan memberikan dukungan advokasi teknis berupa teknik lobi, komunikasi publik di forum-forum legislatif, serta strategi koalisi advokasi. Mengingat tingginya kebutuhan akan literasi kebijakan di kalangan organisasi masyarakat sipil lokal, perlu juga dipertimbangkan untuk mereplikasi program ini ke organisasi pemuda dan organisasi masyarakat sipil lainnya dari berbagai agama di Papua Barat. Selain itu, pembuatan platform digital untuk mempublikasikan ringkasan kebijakan yang disusun oleh pemuda Papua dapat meningkatkan penyebaran dokumen kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Feneteruma, L. (2023). Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua. *Masyarakat Indonesia*, *48*(1). https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1187

InfoPublik. (2024, April 19). *Kabupaten Jayapura Tetapkan 313 Program Prioritas 2025, Pagunya Rp1,4 Triliun*. https://infopublik.id/kategori/nusantara/853846/kabupaten-jayapura-tetapkan-313-program-prioritas-2025-pagunya-rp1-4-triliun

Johannes, A. E., Kusumasari, B., Hadna, A. H., & Retnandari, N. D. (2023). Human Trafficking: A Systematic Review and Future Research Agenda. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, *27*(2), 107. https://doi.org/10.22146/jkap.84709

Kebijakan Kesehatan Indonesia. (2020). *Pelatihan Penulisan Policy Brief Angkatan I - Kebijakan Kesehatan Indonesia*. https://kebijakankesehatanindonesia.net/pelatihan-penulisan-policy-brief-angkatan-i/

Kompas.com. (2024, April 29). *PGI: Pelibatan Gereja dalam Penyelesaian Konflik di Papua Sangat Kurang, Bahkan Nyaris Tak Ada*. https://nasional.kompas.com/read/2024/04/29/20405921/pgi-pelibatan-Gereja-dalam-penyelesaian-konflik-di-papua-sangat-kurang

LAN RI. (2023). *Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial ASN*. https://lan.go.id/pelatihan-kepemimpinan-dan-manajerial-asn

Prasandha, D., & Susanti, Y. D. (2022). Empowering Rural Entrepreneurs through Independent-Entrepreneurship Literacy Program. *ASEAN Journal of Community Engagement*, *6*(1). https://doi.org/10.7454/ajce.v6i1.1176

Purnasasmita, R. K., Paramitha Kristansti Dewi, & Atmodiwirjo Paramita. (2024). Context-Driven Creative Workshop: Celebrating Locality in Disaster-Affected Communities. *ASEAN Journal of Community Engagement*, *8*(1). https://doi.org/10.7454/ajce.v8i1.1304

PWYP Indonesia. (2022, July 20). *Pelatihan Tingkat Dasar Penyusunan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Untuk Advokasi Kebijakan Publik Bagi Organisasi Masyarakat Sipil*. https://pwypindonesia.org/id/pelatihan-tingkat-dasar-penyusunan-ringkasan-kebijakan-policy-brief-untuk-advokasi-kebijakan-publik-bagi-organisasi-masyarakat-sipil/?privacy=updated

SKALA. (2025, November 3). *Memperkuat Advokasi Kebijakan untuk Layanan Dasar yang Inklusif*. https://skala.or.id/informasi-kegiatan/memperkuat-advokasi-kebijakan-untuk-layanan-dasar-yang-inklusif/

Suryawati, D., Firdaus, A., & Supranoto, S. (2023). Design of Quick Wins Based Policy for Facilitation and Assistance of Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs). *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, *27*(1).

The PRAKARSA. (2024, February 29). *Pelatihan Analisis Kebijakan dan Penulisan Policy Brief Angkatan II Sukses Diselenggarakan – The PRAKARSA*. https://theprakarsa.org/pelatihan-analisis-kebijakan-dan-penulisan-policy-brief-angkatan-ii-sukses-diselenggarakan/

Wigati, M., & Ciptanurani, C. (2023). Policy Triangle Analysis of Stunting Issues in Urban Areas: A Case Study of Yogyakarta City. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, *27*(2), 144. https://doi.org/10.22146/jkap.86489

Zulys, A., Syauqi, M. I., Adriana, E. D., Istiqomah, M., Susanto, B. H., & Haidir, B. M. (2023). Community Empowerment in Sajang Village Through Coffee Soap Making and Entrepreneurship Training. *ASEAN Journal of Community Engagement*, *7*(1). https://doi.org/10.7454/ajce.v7i1.1201